



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA TANGERANG

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun anggaran 2023 ini, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.

LKIP merupakan pertanggungjawaban kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan masalah yang diberikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Akta Laporan Kinerja.

Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan dan menyebarkan LKIP Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2023 sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasamanya seluruh jajaran di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam LKIP Tahun 2023 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta kekuatan-atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kota Tangerang.

Tangerang, Januari 2024

**KEPALA DINAS KETENAGAKERIAAN
KOTA TANGERANG**

UJANG HENDRA GUNAWAN, S.Sos, MM
NIP. 19720502 200212 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.3. Struktur Organisasi	7
1.4. Asset	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2023	11
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	11
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, IKU Perangkat Daerah	13
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	17
3.1. Tujuan	17
3.1.1. Uraian Pencapaian Kinerja Utama (TPI)	21
3.1.2. Upaya yang telah dilakukan	24
3.1.3. Permasalahan yang dihadapi	29
3.1.4. Solusi Terhadap Permasalahan	30
3.2. Sasaran	31
3.2.1. Uraian Pencapaian Kinerja Sasaran (Jumlah Lowongan Kerja)	32
3.2.2. Upaya yang telah dilakukan	33
3.2.3. Permasalahan yang dihadapi	35
3.2.4. Solusi Terhadap Permasalahan	40
3.2.5. Uraian Pencapaian Kinerja Sasaran (Prosentase Tenaga Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan)	36
3.2.6. Upaya yang telah dilakukan	40

3.2.7. Permasalahan yang dihadapi	44
3.2.8. Solusi Terhadap Permasalahan	44
3.2.9. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	46
3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
3.4. Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran)	52
3.5. Upaya Mengatasi Kendala Penyerapan	60
BAB IV PENUTUP	61
4.1. Simpulan	61
4.2. Saran	62

LAMPIRAN :

1. Formulir Rencana Strategis SKPD Tahun 2019-2023
2. Formulir Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023
3. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023
4. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketenagakerjaan.....	3
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai SKPD Berdasarkan Jabatan, Pendidikan Terakhir, Golongan/Pangkat, Eselon dan Diklat yang telah diikuti	8
Tabel 1.3	Jumlah dan Kondisi Aset Sarana Prasarana di Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023	9
Tabel 2.1	Tujuan Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tahun 2019-2023	14
Tabel 2.2	Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tahun 2019-2023.....	14
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	15
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Disnaker Tahun 2023.....	16
Tabel 3.1	Capaian Indikator Utama Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023.....	17
Tabel 3.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tangerang Tahun 2019-2023.....	18
Tabel 3.3	Penduduk Menurut Jenis Kegiatan Kota Tangerang Tahun 2023.....	19
Tabel 3.4	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Kota Tangerang Tahun 2023.....	19
Tabel 3.5	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Kota Tangerang Tahun 2023.....	20
Tabel 3.6	Angkatan Kerja Pendidikan dan Jenis Kegiatan Kota Tangerang Tahun 2023.....	20
Tabel 3.7	Jumlah Pelatihan di BLK Tahun 2023.....	24
Tabel 3.8	Pelatihan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2023.....	25
Tabel 3.9	Pelatihan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2019 - 2023.....	26
Tabel 3.10	Kerjasama Pelatihan BLK Kota Tangerang dengan Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia Tahun 2023.....	27
Tabel 3.11	Kerjasama Pelatihan BLK Kota Tangerang dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia Tahun 2023	27
Tabel 3.12	Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial Tahun 2023.....	28

Tabel 3.13	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019-2023	31
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja (1) Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah	33
Tabel 3.15	Program dan Anggaran Yang Menunjang Indikator Jumlah Lowongan Kerja Tahun 2023	33
Tabel 3.16	Data Jumlah Kegiatan Job Fair Tahun 2023	34
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja (2) Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah	35
Tabel 3.18	Data Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Di Kota Tangerang Tahun 2023	36
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah	36
Tabel 3.20	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kota Tangerang Tahun 2019 - 2023	37
Tabel 3.21	Jumlah Pencari Kerja dan Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan (Menurut Tingkat Pendidikan) di Kota Tangerang Tahun 2019 - 2023	38
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah	39
Tabel 3.23	Capaian Indikator Utama Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023	40
Tabel 3.24	SMK dan BKK di Kota Tangerang Tahun 2023	45
Tabel 3.25	Jumlah Kegiatan Pemagangan Tahun 2023	46
Tabel 3.26	Rekapitulasi Output Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Dengan Bangka Menurunkan Angka TPT Tahun 2023	46
Tabel 3.27	Analisis Efisiensi	50
Tabel 3.28	Realisasi Kinerja dan Anggaran Disnaker Tahun 2023	52
Tabel 3.29	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Disnaker Tahun 2023	53
Tabel 3.30	Realisasi Anggaran Per Triwulan Tahun Anggaran 2023	53
Tabel 3.31	Efisiensi Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.....	9
Gambar 3.1	TPT Kota Tangerang Tahun 2019-2023.....	22
Gambar 3.2	Grafik Jumlah Lowongan Kerja Tahun 2019-2023.....	32
Gambar 3.3	Grafik Jumlah Pencari Kerja Tahun 2019-2023.....	37
Gambar 3.4	Grafik Pencari Kerja Terdaftar Yang Tahun 2019-2023.....	38
Gambar 3.5	Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2023.....	54

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang. Selanjutnya mengenai Keadudukan Tugas, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 133 Tahun 2021.

Dinas Ketenagakerjaan bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai Visi, Misi dan Program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023 yaitu Misi 1 yaitu *"Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas"*.

Indikator Sasaran Misi yang ingin dicapai melalui Urusan Ketenagakerjaan adalah *"Terwujudnya Penciptaan Perluasan Kesempatan Kerja"* akan dicapai melalui **Indikator Kinerja : Jumlah Lowongan Kerja dan Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan**.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, maka fokus utama LKIP Tahun 2023 adalah pembahasan tentang pencapaian hasil-hasil dari sasaran strategis tersebut di atas dan sumber-sumber daya yang disediakan. Selain itu, LKIP 2023 juga menguraikan tentang faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja serta strategi yang akan ditempuh untuk mengatasi hal tersebut di masa mendatang.

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tahun 2019-2023 yaitu Meningkatkan Kesempatan Kerja dengan indikator tujuan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada tahun 2023, target indikator TPT yaitu 7,54% dan realisasi sebesar 6,76% (capaian 111,54%).

Sasaran Strategis tersebut dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu jumlah lowongan kerja dan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.

Hasil pengaluran pada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, rata-rata sangat baik dan melampaui (melebihi) target yang ditetapkan. Berikut adalah capaian Kinerja (Indikator sasaran misi) Disaker pada tahun 2023 :

1. Indikator Jumlah Lowongan Kerja

Target lowongan kerja pada tahun 2023 sebanyak 18.000 orang, terealisasi sebanyak 26.869 orang sehingga capaiannya sebesar 149,25%. Jumlah realisasi melampaui target yang telah ditetapkan;

2. Indikator Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan

Target pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2023 sebesar 81,88%, terealisasi sebesar 156,38% sehingga capaiannya sebesar 190,99%. Jumlah realisasi melampaui target yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan, anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang pada tahun 2023 untuk melaksanakan Program Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebesar Rp25.363.718.902,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 23.525.604.419,00 atau terserap 92,75%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 4 (empat) kegiatan, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp19.909.717.712,00 dengan realisasi sebesar Rp18.337.101.769,00 atau capaian serapan sebesar 92,10%;
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp94.869.200,00 dengan realisasi sebesar Rp79.619.000,00 atau capaian serapan sebesar 83,93%;
- c. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 2.656.194.790,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.545.230.450,00 atau capaian serapan sebesar 95,82%;
- d. Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp1.702.858.700,00 dengan realisasi sebesar Rp1.585.427.300,00 atau capaian serapan sebesar 93,10%;

- e. Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp1.000.078.900,00 dengan realisasi sebesar Rp978.225.900,00 atau capaian serapan sebesar 97,81%.

Pada tahun 2023 pencapaian target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,76% dari target indikator TPT yaitu 7,54% (capaian 111,54%) merupakan salah satu indikasi bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kota Tangerang berangsur pulih pasca pandemi Covid-19, dan sinergitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Salah satu kegiatan yang massif dilakukan yaitu Job Fair yang dilaksanakan secara virtual sehingga memudahkan masyarakat (pencari kerja) dalam memperoleh informasi lowongan kerja sesuai dengan kompetensi calon pencari kerja. Hal ini terlihat dari capaian indikator Presentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan yang realisasinya mencapai 100%, serta teradanya jumlah lowongan kerja yang mencapai 26.869 lowongan kerja dari target sebanyak 18.000 lowongan kerja (capaian 149,27%) yang dilakukan melalui job posting ke perusahaan-perusahaan.

Upaya kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam rangka menyerap tenaga kerja terus dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan serta mendorong perusahaan agar melakukan pelaporan pemagangan kerja dan penerimaan tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta mewajibkan LPK Swasta menyampaikan laporan penyairuan/penempatan tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan dan diterima bekerja di perusahaan atau bekerja secara mandiri.

Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai lembaga pelatihan vokasi yang meluluskan tenaga kerja terampil menjadi fokus pembinaan Dinas Ketenagakerjaan melalui program *Link and Match* dengan dunia usaha dan dunia industry.

Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2023 ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang. Berbagai langkah antisipatif akan ditempuh oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan dan bahan pertimbangan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak terhadap tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan bentuk tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang, Dinas Ketenagakerjaan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang. Berdasarkan hal tersebut sebagai organisasi pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan diwajibkan melaporkan hasil kerjanya dalam bentuk LKjIP.

Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Wali Kota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan menjalankan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor Nomor 133 Tahun 2021 Bagian Kedua Pasal 3 ayat 2, yaitu:

- perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang ketenagakerjaan;
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang ketenagakerjaan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan;
- pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang ketenagakerjaan;
- pengelolaan UPT; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sebagai upaya mewujudkan visi Kota Tangerang "Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing", maka Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan Misi ke-1 yaitu: "Bersama mengembanahkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas". Untuk penjabaran misi ditetapkan tujuan dan sasaran seperti yang dijabarkan pada tabel 1.1

Tabel 1.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arab Kebijakan
Dinas Ketenagakerjaan

Misi Terwujudnya Rine Tangguh yang Sejahtera, Berkeadilan, Kemandirian dan Berdaya Saing			
MISI 1 Dinas Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penyelenggaraan Ilmu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arab Kebijakan
Tujuan 1.1 Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kerja	Sasaran 1.2.2 Meningkatkan Kemampuan Kerja	Strategi 1.2.2.1 Perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja dan kewirausahaan, peningkatan kualitas tenaga kerja	Arab Kebijakan 1.2.2.1.1 Memperluas forum tenaga kerja dan perusahaan serta meningkatkan keterampilan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, produktivitas, pengetahuan dan pertanggung jawaban kerja

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Kota Tahun 2019-2023

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1. Kesempatan Kerja

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai tujuan pelayanan Dinas Ketenagakerjaan yaitu Meningkatkan kesempatan kerja antara lain masih banyak perusahaan yang tidak menyampaikan lowongan kerja serta perencanaan tenaga kerja ke Dinas Ketenagakerjaan, serta pendampingan yang belum dilaksanakan secara optimal bagi peserta pelatihan kerja baik yang berbasis kompetensi maupun yang berbasis kewirausahaan serta belum optimalnya kegiatan pemagangan di perusahaan-perusahaan. Tercatat pada tahun 2023 perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja berdasarkan data Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) sebanyak 543 perusahaan dari total perusahaan sebanyak 19.054 perusahaan terdiri dari perusahaan mikro, kecil, menengah dan besar.

Kesempatan kerja dapat dilihat dari indikator ketenagakerjaan yang biasa digunakan untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang semanggunya terlibat

atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu adalah Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK). Secara khusus APAK bisa diartikan sebagai bagian dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu pemcaan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

Indikator lainnya yang terkait dengan ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ketahun.

2. Pelatihan Kerja

Salah satu upaya untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Tangerang yaitu melalui pelatihan. Pelatihan dilaksanakan pada lembaga pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Bursa Kerja Khusus (BKK) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksanaan pemasukan, penyaluran dan penempatan tenaga kerja yang merupakan mitra Dinas Ketenagakerjaan.

Selain pelatihan yang diselenggarakan oleh UPT BLK, Dinas Ketenagakerjaan menyelenggarakan pelatihan untuk mendorong peserta mampu

menjadi wirausahawan, melalui kegiatan pelatihan kerja pada kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja yang diselenggarakan di BLK antara lain terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Ketepatan program vokasi yang dilaksanakan di BKK akan mendorong keberhasilan program *Link and Match* antara dunia pendidikan dan dunia usaha/industri. Keberhasilan pembinaan LKP Perusahaan dan LKP Swasta menjadi salah satu pendorong dalam peningkatan kualitas dan produktivitas pekerja.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan adalah dengan membentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) dan pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Tingkat Kota Tangerang.

3. Hubungan Industrial

Hubungan industrial merupakan salah satu faktor pendulang bidang ketenagakerjaan. Melalui pembinaan hubungan industrial yang kuat, maka perselisihan kerja antara pekerja dan pengusaha dapat dihindari. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial (PHI). Pembinaan yang dilakukan baik pelaksanaan bimbingan teknis maupun pembinaan secara langsung melalui monitoring ke perusahaan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan pencegahan dini agar tidak terjadi perselisihan, aksi unjuk rasa dan mogok kerja.

Maailah tingginya jumlah perselisihan yang terjadi antara pekerja dengan perusahaan membutuhkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang didukung oleh tenaga yang profesional (mediator perselisihan hubungan industrial) serta sarana penanganan mediasi yang memadai.

Potensi organisasi merupakan kombinasi dari berbagai faktor obyektif dan subyektif yang memastikan pelaksanaan tugas yang ditetapkan dan strukturnya yang agak kompleks ditentukan tidak hanya oleh profesionalisme manajemen yang tinggi.

tetapi juga oleh kombinasi dari berbagai faktor organisasi. Potensi organisasi harus dipertahankan sebagai komponen strategis dari potensi keseluruhannya berdasarkan penggunaan metode modern manajemen, termasuk target program dan pendekatan sistem. Potensi organisasi yang terdapat pada Dinas Ketenagakerjaan merupakan sumber daya utama organisasi meliputi:

1. Pegawai Dinas Ketenagakerjaan.

Keberadaan pegawai yang sesuai dengan kompetensi merupakan salah satu unsur keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tujuan organisasi.

2. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana unsur penunjang pelaksanaan tujuan organisasi.

3. Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah

Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan memiliki BLK yang tersebar di empat wilayah dengan menjalankan program pelatihan kerja berbasis kompetensi.

4. LKS Bipartit/LKS Tripartit

Lembaga Kerja Sama Bipartit merupakan sarana hubungan industrial yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang harmonis antara pekerja dengan perusahaan. Sedangkan Lembaga kerja sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah.⁷

5. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta

Lembaga ini memberikan pelatihan sesuai dengan bidang kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat. LPK memiliki perhatian khusus dari pemerintah sehingga pendirian perusahaannya membutuhkan izin dari pemerintah.

6. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Perusahaan

Lembaga ini berada di perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan *skill* karyawan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan karyawan.

7. Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas

BLK Komunitas adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan sebaran lembaga pelatihan kerja, serta mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat atau komunitas.

8. Bursa Kerja Khusus (BKK)

BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di SMK baik Negeri maupun Swasta sebagai unit pelaksana yang melayani dan memberikan informasi lowongan pekerjaan, pemataran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja. BKK merupakan mitra dari Dinas Ketenagakerjaan.

9. Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID)

Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID Daerah) merupakan wadah komunikasi yang berkegiatan dengan sinkronisasi program pelatihan dengan kebutuhan industri serta menumbuhkan kepercayaan kepada pihak industri bahwa BLK merupakan lembaga yang tepat untuk penyiapan tenaga kerja industri.

10. Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Tingkat Kota Tangerang

Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) adalah wadah tunggal koordinasi para penanggung kepentingan penyelenggara Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di daerah.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi

Kecamatan merupakan wilayah kerja sebagai perangkat daerah, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, Pelayanan Umum serta Kemasyarakatan dan Kelurahan, sesuai dengan visi dan misi Wali Kota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Wali Kota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Tangerang Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan, struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas
 - Kelompok Jabatan Fungsional
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja

Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan visi dan misi Wali Kota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2023 melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang ketenagakerjaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang ketenagakerjaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenagakerjaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang ketenagakerjaan;
- e. Pengelolaan UPT; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

1.3. Struktur Organisasi

Jumlah pegawai yang ada di Dinas Ketenagakerjaan per 31 Desember 2023 sebanyak 97 pegawai terdiri dari:

1. Pegawai PNS: 37 Pegawai terdiri:
 - a. Pejabat Struktural : 9 Pegawai
 - b. Ketua Tim Kerja : 10 Pegawai
 - c. Fungsional Tertentu : 4 Pegawai
 - d. Fungsional Umum : 14 Pegawai
2. Pegawai Non PNS: THL 58 Pegawai

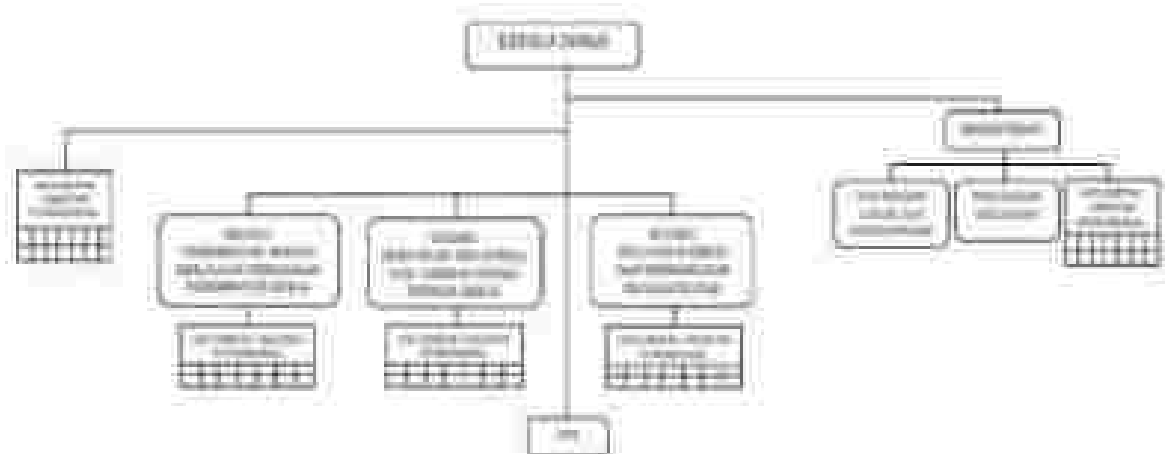
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan jabatan, Pendidikan Terakhir, Golongan/Pangkat, Eselon dan Diklat yang telah diikuti

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERTAMBAH)										GOLONGAN/PANGKAT					PEYONGKORAN PELATIHAN STRUKTURAL				
	DE	KELOMPOK	S D	S L	S E	D D	D S	D E	S L	S E	S E	DL	Non PNS	I	II	III	IV	PKM I	PKM II	PKM III	PKM IV	
Kepala Dinas	1																					
Sejabat Kepala Dinas	1																					
Kepala Bidang	2								1	1						2						
Kepala Sub Bidang	2								2	1						2						
Ketua Tim Kerja	10								6	4						6	2					
Kepala PTU Bina	1																					1
Kepala TU/PTU III A	1																					1
Pegawai Tertentu	4								1	1	2					1	1					
Pegawai Umum	14								1	2	1					1	1					
Jumlah	37								7	10	11					7	4					2

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, 27 Desember 2023

Gambaran umum kondisi pegawai yang ada di Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan jabatan, pendidikan terakhir, golongan/pangkat, eselon dan diklat yang telah diikuti disajikan pada Tabel 1.2. dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinas Ketenagakerjaan kekurangan SDM, dapat dilihat dari jumlah pegawai struktural sebanyak 9 pegawai untuk semua jabatan terisi dari 37 jabatan yang tersedia.
2. Sedikitnya jumlah staf/pelaksana PNS Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu, sehingga harus nempokerjakan Non PNS (THL) sebanyak 58 pegawai honorer.
3. Kurangnya kompetensi pegawai Dinas Ketenagakerjaan yang dapat dilihat dari masih terdapat pegawai Dinas Ketenagakerjaan yang berijazah SLTA sebanyak 4 Pegawai.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan

1.4. Aset

Aset yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan merupakan sarana prasarana untuk menunjang seluruh program kegiatan, sehingga dengan adanya dukungan dari sarana prasarana akan mempermudah dan mempercepat pelaksanaan program kegiatan. Adapun aset yang ada di Dinas Ketenagakerjaan terdiri dari barang inventaris yang berupa barang habis pakai ataupun berupa barang lainnya yang membutuhkan pemeliharaan secara terus menerus ataupun berkala. Adapun jumlah aset yang digunakan dan yang tidak digunakan berdasarkan tahun pengadaan di Dinas Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah dan Kondisi Aset Sarana Prasarana
di Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023

No	Aset SKPD	Jumlah	Satuan	Kondisi			Tahun Perorohan	Nilai Rupiah
				Baik	Sedang	Rusak		
1	TANAH	3	unit	✓			6.527.951.530,00	
2	PERALATAN DAN MESIN	1278	unit	✓			10.172.957.477,50	
	a. Alat besar	3	unit	✓			218.359.000,00	
	b. Alat bantu	3	unit	✓			218.359.000,00	
	c. Alat angkutan	50	unit	✓			2.671.880.013,47	
	d. Alat angkutan darat bermotor	36	unit	✓			2.612.582.813,47	
	e. Alat angkutan darat tak bermotor	14	unit	✓			59.297.500,00	
	f. Alat - alat Bengkel dan alat Ukur	97	unit	✓			1.689.789.722,65	
	g. Alat bengkel tak bermesin	65	unit	✓			1.174.983.835,2	

No	Aset SKPD	Jumlah	Satuan	Kondisi			Tahun Perolehan	Nilai Rupiah
				Baik	Sedang	Rusak		
							1	
	h. Alat ukur	24	unit	✓			453.893.726,94	
	i. Alat Pertanian/Peternakan	2	unit	✓			28.912.170,00	
	j. Alat pengolahan	2	unit	✓			11.500.000,00	
	k. Alat Kantor dan Rumah tangga	794	unit	✓			11.900.000,00	
	l. Alat kantor	158	unit	✓			570.065.691,65	
	m. Alat rumah tangga	476	unit	✓			1.614.574.434,47	
	n. Meja dan kursi kerjajabat pejabat	153	unit	✓			345.913.804,22	
	o. Alat Studio Komunikasi dan pemancar	46	unit	✓			269.520.729,31	
	p. Alat studio	35	unit	✓			230.588.057,60	
	q. Alat komunikasi	11	unit	✓			38.062.671,71	
	r. Komputer	275	unit	✓			2.740.039.973,03	
	s. Komputer unit	201	unit	✓			2.519.390.128,58	
	t. Peralatan komputer	74	unit	✓			230.649.843,45	
	u. Alat Keselamatan Kerja	2	unit	✓			22.400.000,00	
	v. Alat SAR	2	unit	✓			22.400.000,00	
	x. Alat olahraga		unit	✓				
	y. Alat pelatihan dan percobaan	9	unit	✓			129.913.008,70	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	14	unit	✓			16.357.185.358,63	
	a. Bangunan Gedung	11	unit	✓			16.357.185.358,10	
	b. Bangunan gedung tempat kerja	11	unit	✓			16.357.185.358,10	
	c. Tugu Titik Kontrol/Pasok	3	unit	✓			339.736.577,53	
4	JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN							
	a. Jalan dan Jembatan							
	b. Bangunan Air/irigasi							
	c. Instalasi							
	d. Jaringan							
5	ASET TETAP LAINNYA							
	a. Buku Perpustakaan							
	b. Barang Bercorak							
	c. Kesenian/Kebudayaan							
	d. Hewan							
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN							
	ASET LAINNYA:							
	a. Aset Tak Berwujud (Software)	3	unit	✓			137.940.000,00	
	b. Aset Tak Berwujud (Kajian)	3	unit	✓			137.940.000,00	
7	ASET LAINNYA	1	unit	✓			1.410.000,00	
	a. Aset lainnya	1	unit	✓			1.410.000,00	
	Jumlah	1.299	unit				33.379.300.843,13	

Sumber : Berdasarkan barang Dinas Kecamatan/Desa 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini.

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima tahun).

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Secara lebih rinci,jabaran visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Perubahan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 yang berhubungan dengan Dinas Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Visi

"Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing"

Kota Tangerang yang sejahtera diwujudkan dengan tercapainya tatal kehidupan masyarakat yang baik dan berkualitas sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang makmur dan berkeadilan serta menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek dalam pembangunan.

Kota Tangerang yang berakhlakul kharimah diwujudkan dengan tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku akhlak mulia yang dicerminkan melalui kualitas hubungan antar manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia itu sendiri, dan menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan material spiritual, sehingga mampu mewujudkan sebuah masyarakat madaniyyah dan hidup menuju negeri yang adil, makmur, dan diberkati (*baladun tayyibatun warahbun ghafur*).

Kota Tangerang yang berdaya saing diwujudkan dengan tercapainya sumber daya manusia (SDM) yang inovatif, kreatif dan kompetitif; perekonomian daerah yang inovatif, kreatif, kompetitif dan berkeadilan; infrastruktur, fasilitas, permukiman kota yang inovatif dan kompetitif dan lingkungan hidup; serta didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, prima, inovatif, kreatif dan kompetitif dalam menyongsong era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

Misi ke 1

"Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Berintegritas"

Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kota Tangerang yang cerdas, sehat, berakhlak mulia dan berdaya saing. Daya saing sumber daya manusia (SDM) masyarakat ini diwujudkan dengan tercapainya kualitas SDM masyarakat yang inovatif, kreatif dan kompetitif dalam menyongsong era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat akan berjalan dengan optimal apabila ditunjang oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif. Kemajuan dan inovasi pelayanan publik dihadirkan agar daya saing tata

kelola pemerintahan Kota Tangerang mampu menjawab tuntutan masyarakat dan dapat turut andil dan mengambil peran penting di dalam era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, IKU Perangkat Daerah

A. Tujuan Dinas Ketenagakerjaan

Tujuan Dinas Ketenagakerjaan tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023. Selanjutnya Dinas Ketenagakerjaan menyusun Rencana Strategis Disnaker Kota Tangerang Tahun 2019-2023 dan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya.

Ketiga komponen dokumen perencanaan diatas yaitu RPJMD Perubahan Tahun 2019-2023, Renstra Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun tersebut, saling terkait dan menghasilkan energi yang cukup kuat dalam menciptakan pedoman strategis bagi Disnaker Kota Tangerang terutama dalam mendukung Visi Kota Tangerang yaitu : **"Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Kharimah dan Berdaya Saing"** melalui Misi Ke 1 yaitu **"Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas"** dengan tujuan ke 2 yaitu **"Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat"**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menanganai isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Disnaker dan memiliki keterkaitan dengan visi dan Misi Kota Tangerang yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun

measurable, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Tabel 2.1
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan
Tahun 2019-2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat Penganggaran Terbuka (IPT)

Sumber : Rencana Perubahan Tahun 2019-2023

B. Sasaran Dinas Ketenagakerjaan

"Meningkatkan Penciptaan Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Kerja".

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya.

Tabel 2.2
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan
Tahun 2019-2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Penciptaan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Penempatan Kerja	Jumlah lowongan kerja
	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

Sumber : Rencana Perubahan Tahun 2019-2023

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinasaker mempunyai tugas meminta Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,54
2	Jumlah lowongan kerja	Orang	18.000
3	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	81,88

Sumber : Rencana Pembangunan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan teka-teki dari janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi ada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada perbedaan antara target kinerja pada Rencana Kerja dengan yang di Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Disnaker Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,54
2	Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja dan Penempatan Kerja	Jumlah lapangan kerja	Orang	18.000
		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	81,88

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Perintang: Uraian Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	18.377.101.769,00
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	94.869.200,00
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.656.194.700,00
4.	Program Penempatan Kerja	1.782.858.700,00
5.	Program Hubungan Industrial	1.000.078.900,00
Jumlah		25.367.718.902,00

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

3.1. Tujuan

Tujuan :
Meningkatkan Kesempatan Kerja

Tabel 3.1
 Capaian Indikator Utama Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2023		
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,13	6,63	9,04	7,16	7,54	6,76	111,54

Sumber: BPS Kota Tangerang, Disdik Tahun 2019-2023

Tujuan Dinas Ketenagakerjaan yaitu meningkatkan kesempatan kerja dengan indikator kinerja utama yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini merupakan indikator makro pembangunan. Angka TPT bersumber dari Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS.

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan.

karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ketahun.

Secara rinci rumusan indikator sebagai berikut:

$$\text{Rumusan: } TPT = PP/PAK \times 100\%$$

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

PP = Jumlah Penangguran (orang)

PAK = Jumlah Angkatan Kerja (orang)

Berdasarkan Tabel 3.1 tercatat pada tahun 2020-2021 TPT mengalami kenaikan disebabkan pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2022 dan 2023, TPT mengalami penurunan seiring dengan kondisi yang semakin membaik.

Tabel 3.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2019 - 2023

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %
2019	65,73
2020	64,97
2021	64,52
2022	66,03
2023	63,39

Sumber: RPS Kota Tangerang Tahun 2019-2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap jumlah penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir (2019 – 2023) nilai Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 nilai Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) untuk Kota Tangerang sebesar 63,39 %, turun dari tahun sebelumnya 66,08%. Angka tersebut menggambarkan dari 100 orang yang termasuk ke dalam Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) pada Tahun 2023 terdapat 63 orang yang merupakan angkatan kerja.

Berdasarkan data Sakernas BPS Tahun 2023 kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Penduduk Menurut Jenis Kegiatan
Kota Tangerang Tahun 2023

Jenis Kegiatan	Laki-laki	Pemugian	Total	TPAK	TFT
Bekerja	538.492	318.352	876.844	63,39	6,76
Pengangguran	37.172	34.908	61.530		
Bukan Angkatan Kerja	149.087	406.724	543.131		
Jumlah	745.311	738.154	1.401.355		

Sumber : BPS Sakernas 2023

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, terlihat bahwa jumlah pada tahun 2023 penduduk yang bekerja sebanyak 876.844 orang, pengangguran sebanyak 61.530 orang dan penduduk yang bukan angkatan kerja sebanyak 543.131 orang. Dari data tersebut maka didapat angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 63,39% dan angka Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,76%.

Tabel 3.4
Penduduk Bekerja Lapangan Pekerjaan
Kota Tangerang Tahun 2023

Lapangan Kerja (3 Sektor)	Laki-laki	Pemugian	Total
Pertanian	10.483	2.170	12.873
Manufaktur	178.382	65.951	236.333
Jasa-jasa	377.787	344.931	623.638
Jumlah	538.492	318.352	876.844

Sumber : BPS Sakernas 2023

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, terlihat bahwa jumlah pada tahun 2023 penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 12.837 orang, sektor manufaktur sebanyak 236.333 orang dan penduduk yang bekerja pada sektor jasa sebanyak 627.638 orang.

Tabel 3.5
Penduduk Bekerja Status Pekerjaan Utama
Kota Tangerang Tahun 2023

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Pertanian	Jumlah	Femal	Jumlah
Berusaha sendiri	126.962	63.634	190.596		
Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak tetap	16.651	13.730	34.381		
Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar	17.176	1.400	18.566	716.247	390.109
Buruh/karyawan/pegawai	362.543	198.463	561.006		
Pekerja bebas	23.109	7.488	30.597		
Pekerja keluarga/tidak dibayar	12.091	29.607	41.698		
Total	558.492	318.352	876.844		

Sumber : BPS, Sekertias 2023

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa jumlah pada tahun 2023 penduduk yang Berusaha sendiri sebanyak 190.596 orang. Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak tetap sebanyak 34.381 orang. Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar sebanyak 18.566 orang. Buruh/karyawan/pegawai sebanyak 561.006 orang. Pekerja bebas sebanyak 30.597 orang dan Pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 41.698 orang.

Tabel 3.6
Angkasan Kerja Memori Pendidikan dan Jenis Kegiatan
Kota Tangerang Tahun 2023

Pendidikan Ditamatkan	Jenis Kegiatan	Laki-laki	Pertanian	Jumlah	Angkasan Kerja
++SD	Bekerja	72.077	37.184	129.261	133.028
	Pengangguran	3.767	0	3.767	
SMP	Bekerja	65.397	37.391	102.788	109.893
	Pengangguran	3.747	3.354	7.101	

Tingkat Pendidikan	Tipe Kegiatan	Lulusan	Pengguna	Jumlah	Angkatan Kerja
SMA Umum	Bekerja	114.535	73.129	237.664	253.040
	Pengangguran	7.337	8.039	15.376	
SMA Kejuruan	Bekerja	133.033	62.002	195.035	217.930
	Pengangguran	13.510	8.843	22.353	
Diploma I/II/III	Bekerja	10.067	9.506	27.573	29.337
	Pengangguran	1.764	0	1.764	
Universitas	Bekerja	185.381	79.140	264.521	197.686
	Pengangguran	7.047	6.130	13.177	
Total	Bekerja	538.492	318.352	876.844	940.376
	Pengangguran	37.372	26.358	63.730	

Sumber : BPS Sulawesi 2023

Berdasarkan Tabel 3.6 di atas, terlihat bahwa jumlah pada tahun 2023 jumlah Angkatan Kerja berdasarkan tingkat pendidikan SD sebanyak 133.028 orang, tingkat pendidikan SMP sebanyak 109.893 orang, tingkat pendidikan SMA Umum sebanyak 253.040 orang, tingkat pendidikan SMA Kejuruan sebanyak 217.930 orang, tingkat pendidikan Diploma I/II/III sebanyak 29.337 orang, dan tingkat pendidikan Universitas sebanyak 197.686 orang.

3.1.1. Uraian Pencapaian Kinerja Utama (TPT)

a. Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023

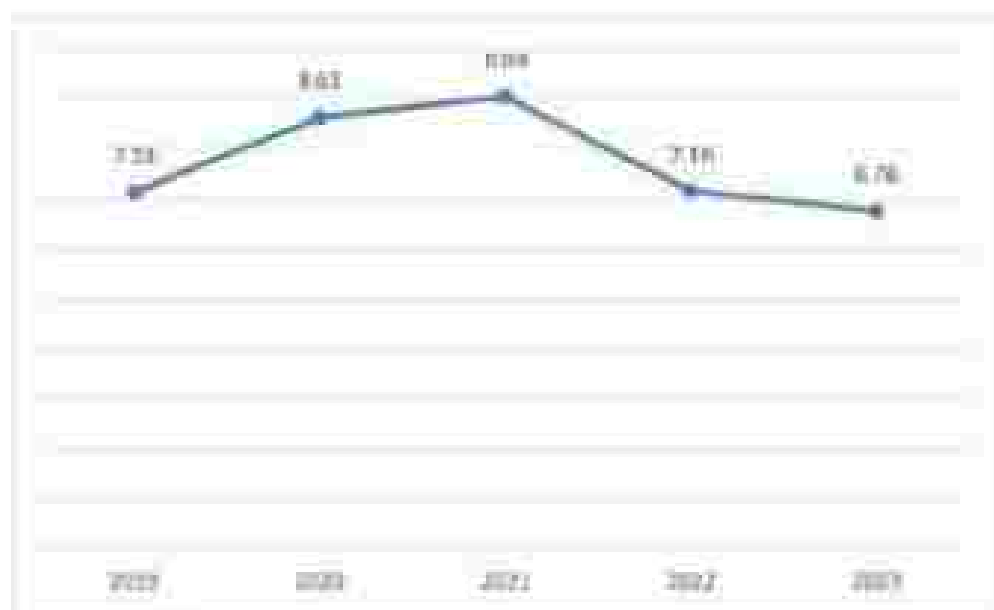
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia, pada 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Kota Tangerang sebesar turus dari 7,16 % menjadi 6,76% (turun sebesar 0,40%). Hal ini mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

b. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya (2019-2023).

Analisis Capaian Kinerja merupakan proses untuk mengukur suatu kondisi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam, analisis kinerja paling tidak dilakukan dengan cara melakukan analisis adanya beda (*performance gap analysis*), yaitu melihat beda (*gap*) antara yang sudah direncanakan dengan realisasinya atau kenyataannya. Jika terdapat *gap* yang besar, maka perlu diteliti sebab-sebabnya berikut berbagai informasi kendala dan hambatannya termasuk usulan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut.



Sumber: BPS Seleksi 2019-2023

Gambar 3.1
TPT Kota Tangerang Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar 3.1, terlihat bahwa TPT di Kota Tangerang mengalami kenaikan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari dampak pandemic covid-19 yang melanda dunia dan berpengaruh pada sector ketenagakerjaan. Banyaknya perusahaan tutup mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran serta tidak banyak perusahaan yang menyerap tenaga kerja pada kondisi tersebut. Begitu pula dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Tangerang mengakibatkan menurunnya aktivitas masyarakat dan berpengaruh terhadap sektor usaha dan industri yang melibatkan banyak tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka menjadi naik.

Sering dengan mulai menurunnya kasus covid-19 dan penurunan status PPKM di sejumlah wilayah termasuk di Kota Tangerang, kondisi sector ketenagakerjaan mulai bangkit dan berdampak pada menurunnya angka TPT pada tahun 2022 dan tahun 2023.

c. Analisis Pencapaian Target Akhir 2023 Terhadap Target Akhir Renstra OPD

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan revolusi tahun 2023 untuk memperkuat dan mengembangkan kebijakan pasar tenaga kerja. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kompleksitas tantangan ketenagakerjaan pada tahun 2023. Meskipun kondisi perekonomian nasional, khususnya ketenagakerjaan mulai bangkit, namun masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, yaitu ketidakpastian ekonomi global tahun 2023.

Target TPT pada akhir periode Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 sebesar 7,54 persen. Adapun realisasi TPT Tahun 2023 atau akhir periode Renstra sebesar 6,76 persen atau turun sebesar 0,78 persen.

Upaya massif yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam rangka menurunkan angka TPT dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan yang difokuskan pada penurunan angka TPT. Pada tahun 2022 jumlah pengangguran di Kota Tangerang sebanyak 63.530,00 orang dan pada tahun 2023 turun menjadi 63.530,00 orang.

Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023, di Kota Tangerang ada sekitar 68,57 persen pencari kerja berpendidikan SMK/SMA. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja serta penajaman program *link and match* pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry.

Bangkanya kondisi perekonomian diharapkan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja khususnya terhadap pencari kerja dengan tingkat pendidikan SMK/SMA.

3.1.2. Upaya Yang Telah Dilakukan Untuk Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang telah melakukan berbagai program dan kegiatan dalam rangka menurunkan angka TPT. Program dan kegiatan dimaksud yaitu :

Tabel 3.7
Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan
Dalam Rangka Menurunkan Angka TPT
Tahun 2023

No	Nama Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Bagi Pencari Kerja	45 kegiatan,
			Perbaikan Kompetensi Kerja	1.053 orang peserta pelatihan kewirausahaan
		2. Pengolahan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/ Bursa Kerja	12 kegiatan Job Fair (264 perusahaan, 29.346 lowongan kerja, 15.406 pelamar, 13.125 Pencari Kerja Terdaftar yang ditamparkan, 2.403 siswa belajar melalui Bursa Kerja Khusus
		3. Perlindungan PMI (Pria dan Perempuan Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	185 orang PMI yang terdata
2	Program Pelatihan Kerja Bagi Peningkatan Produktivitas	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	336 orang pencari kerja yang dilatih di Balai Latihan Kerja, 139 orang pencari kerja

No	Nama Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output
				yang dilatih di melalui program kerjasama dengan Yayasan Habitat Kemahasiswa Indonesia
				40 orang pencari kerja yang dilatih di melalui program kerjasama dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia
		Pendidikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pendidikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	00 LPK yang dilatih
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	257 tenaga kerja berprestasi INSP melalui BLK
			Tenagaangan	199 tenaga kerja berprestasi INSP melalui Yayasan Habitat Kemahasiswa Indonesia
				407 orang mengikuti penempatan kerja di B perusahaan
3	Program Hiburhan industrial	Pengesehan Peraturan Persetujuan dan Pendaftaran Persewaan Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hawil beroperasi dalam 1 (satu) Desa/ Kabupaten/Kota	Pendaftaran Persewaan Kerja Waktu Terbatas (PKWT)	4.714 orang mengikuti program PKWT

Program dan kegiatan pelatihan kerja baik berbasis kompetensi maupun berbasis kewirausahaan yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan TPT oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Jumlah Pelatihan di BLK Kota Tangerang
Tahun 2023

No.	Nama Pelatihan	Target	Realisasi	Jumlah Peserta
1	Mengajar Pakikan	5 Angkatan (129 orang)	5 Angkatan	92 orang
2	Operator Komputer	3 Angkatan (60 orang)	3 Angkatan	54 orang
3	Design Grafis dan Digital Printing	4 Angkatan (90 orang)	4 Angkatan	79 orang
4	Perhotelan	1 Angkatan (20 orang)	1 Angkatan	4 orang
5	Tata Setape Malar Konvensional	1 Angkatan (20 orang)	1 Angkatan	17 orang
6	Tata Boga	1 Angkatan (45 orang)	1 Angkatan	43 orang
7	Teknis Pendingin	1 Angkatan (20 orang)	1 Angkatan	17 orang
8	Instansi Listrik	1 Angkatan (20 orang)	1 Angkatan	17 orang
9	Teknik Otomotif (Servis Berhala Kendaraan Ringan)	1 Angkatan (29 orang)	1 Angkatan	19 orang
	Jumlah	29 Angkatan (385 orang)	29 Angkatan	336 orang

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2023

Pada tahun 2023, UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Tangerang dapat melaksanakan seluruh kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dengan lulusan sebanyak 336 orang dari target sebanyak 385 orang (88,42%).

Selain pelatihan yang diselenggarakan oleh UPT BLK, Dinas Ketenagakerjaan menyelenggarakan pelatihan berbasis kewirausahaan dalam kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja untuk mendorong peserta mampu menjadi wirausahawan. Dalam kurun waktu 2019 - 2023, jumlah peserta yang sudah dilatih sebanyak 3.842 orang. Tahun 2023 yang dilatih sebanyak 1.069 orang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Pelatihan Perluasan Kesempatan Kerja
Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)	Total (Orang)
2019	Tata Rias Wajah	60	325
	Bahasa	90	
	Sablon	75	
	Manajemen Usaha	100	
2020	Digital Marketing	64	64
	Bahasa	100	
2021	Digital Marketing	170	640
	Pembuatan Makanan	100	
	Sablon	30	

Tahun	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)	Total (Orang)
2022	Bahasa	235	1.014
	Digital Marketing	267	
	Packaging	200	
	Sablon	126	
	Pembuatan Makanan	237	
	Content Creator	301	
2023	Bahasa	366	1.009
	Digital Marketing	429	
	Pembuatan Makanan	146	
	Content Creator	108	
Total			1.042

Sumber: Dinas Ketrampilan Kota Tangerang, 2023

Selain program pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan dengan menggunakan APBD, pelatihan berbasis kompetensi juga dilaksanakan melalui kerjasama dengan organisasi/lembaga non pemerintah, yaitu Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Kerjasama Pelatihan BLK Kota Tangerang dengan
Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia
Tahun 2023

No	Nama Pelatihan	Target	Realisasi	%
1	Asa Konstruksi	200 orang	199 orang	99,50

Sumber: Dinas Ketrampilan Kota Tangerang, 2023

Tabel 3.11
Kerjasama Pelatihan BLK Kota Tangerang dengan
Yayasan Plan Internasional Indonesia
Tahun 2023

No	Nama Pelatihan	Target	Realisasi	Jumlah Peserta
1	Web Programming	1 Angkatan (20 orang)	1 Angkatan	20 orang
2	Digital Marketing	1 Angkatan (20 orang)	1 Angkatan	20 orang
Jumlah		2 Angkatan (40 orang)	2 orang	40 orang

Sumber: Dinas Ketrampilan Kota Tangerang, 2023

Selain itu, terdapat Program Hubungan Industrial dengan kegiatan :

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan Industrial bertujuan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan di perusahaan.

Sarana hubungan industrial terdiri dari : 1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, 2) Organisasi Pengusaha, 3) Lembaga Kerjasama Bipartit, 4) Lembaga Kerjasama Tripartit, 5) Peraturan Perusahaan, 6) Perjanjian Kerja Bersama, 7) Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan 8) Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dengan demikian, maka hubungan industrial merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam bidang ketenagakerjaan. Melalui pembinaan hubungan industrial yang kuat, maka perselisihan kerja antara pekerja dan pengusaha dapat dihindari. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial (PHI).

Tabel 3.12
Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial
Tahun 2023

No	Kategori	Jumlah Kasus	Jumlah Tindakan Sempit	Penyelesaian			Jumlah	
				Anjuran	Persetujuan Bersama	Bipartit	Putusan	Selanjut
1	PHI	135	293	59	25	19	14	103
2	Kemungkinan	0	0	0	0	0	0	0
3	Non	0	0	0	0	0	0	0
4	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		135	293	59	25	19	14	103

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2023

Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial :

- a. Anjuran : 59 kasus
- b. Persetujuan Bersama : 25 kasus
- c. Bipartit : 19 kasus

- d. Proses Penyelesaian : 14 kasus
- e. Kasus Yang Dicapai : 16 kasus
- Jumlah : 135 kasus

Kasus perselisihan hubungan industrial yang masih dalam proses penyelesaian sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 14 kasus.

Dinas Ketenagakerjaan telah melakukan upaya-upaya dalam rangka dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis sebagai berikut :

1. Memaksimalkan fungsi dan peran mediator dalam menjalankan tugasnya;
2. Meningkatkan sinergitas antara pekerja dan pengusaha melalui kelembagaan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota (Depeko);
3. Melakukan pembinaan ke perusahaan melalui monitoring langsung ke perusahaan yang dilakukan secara bertamabama dengan Anggota LKS Tripartit dan Anggota Depeko;
4. Melaksanakan kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

3.1.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Berdasarkan gambaran angka TPT di Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang terus berusaha menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka antara lain dengan keterpaduan program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh OPD dilindungi pemerintah Kota Tangerang yang masih perlu ditingkatkan.

Selain itu peran BKK dalam penyaluran lulusannya melalui program *link and match* dengan perusahaan masih dirasakan belum optimal dan belum dilengkapinya data jumlah lulusan SMK yang terserap di lapangan usaha. Hal ini membutuhkan sinergitas dalam penentuan program vokasi yang dilaksanakan di SMK antara Dinas Ketenagakerjaan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Lulusan pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan di BLK belum seluruhnya bisa diserap oleh industri/perusahaan. Diperlukan upaya yang massif untuk dapat menyalurkan lulusan pelatihan kerja antara Dinas Ketenagakerjaan dengan Dinas Usaha dan Dunia Industri.

Pelatihan berbasis kewirausahaan melalui kegiatan Perbaikan Kesempatan Kerja dimana lulusan pelatihan ini dapat menjadi tenaga kerja mandiri belum sesuai dengan harapan. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum optimalnya pendampingan dan

bantuan akses modal usaha yang akan membuka peluang mereka menjadi wirausaha baru.

Pada bidang Hubungan Industrial masih belum optimalnya sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan mediasi apabila terjadi persejlesihan hubungan industrial serta terbatasnya jumlah fungsional mediator. Belum semua perusahaan memiliki sarana hubungan industrial.

3.1.4. Solusi Terhadap Permasalahan

Dalam kondisi seperti ini, perlu adanya pengarahannya pembangunan yang ramah ketenagakerjaan (*employment-growthfriendly*), dimana pembangunan harus mereposisi paradigma pada orientasi ketenagakerjaan yaitu penciptaan kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga pendayagunaan tenaga kerja secara optimal tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan dapat tercapai. Sinergi antara BPS dan Pemerintah Kota Tangerang dan keterpaduan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat program pelatihan keterampilan kerja yang dilaksanakan oleh DPD harus berorientasi pada tercapainya outcome untuk menurunkan angka TPT.

Pembinaan terhadap BKK lebih ditingkatkan melalui sinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan perusahaan yang ada di Kota Tangerang untuk lebih mengoptimalkan program *link and match*, sehingga lulusan SMK dapat terserap seluruhnya.

Analisis kebutuhan pelatihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana pada BLK yang lebih up to date, serta adanya pemberian bantuan modal usaha dan pendampingan bagi lulusan pelatihan berbasis kewirausahaan diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran secara signifikan.

Beberapa alternatif penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, sebagai berikut:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan mediasi yang representatif, sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik;
- b. Menambah jumlah fungsional mediator persejlesihan hubungan industrial dengan mengajukan permohonan penambahan fungsional mediator dan mengusulkan pegawai yang untuk mengikuti diklat fungsional mediator;

- c. Mendorong perusahaan untuk memenuhi sarana dan prasarana hubungan industrial.

3.2 Sasaran



Tabel 3.13
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019-2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2023			Ketersediaan Lapangan	Target Akhir Rencana (2023)
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%		
Meningkatkan Penciptaan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Penempatan Kerja	Jumlah Lowongan Kerja	Orang	22004	16590	22462	22737	18000	26064	144,77	22262	10000
	Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	60,50	60,00	60,72	74,05	81,00	100	122,13	60,27	61,00

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang 2023

1. Jumlah Lowongan Kerja

Berdasarkan Tabel 3.11 dalam rangka Meningkatkan Penciptaan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Penempatan Kerja, didukung dengan 2 (dua) indikator yaitu 1) Jumlah lowongan kerja dan 2) Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan. Realisasi selama periode 2019-2023, jumlah lowongan kerja mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Sedangkan realisasi Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Salah satu pendekatan yang sering dilakukan terkait dengan ketenagakerjaan adalah optimalisasi kemampuan dan keterampilan berdasarkan kebutuhan serta penyesuaian jenis lowongan pekerjaan dengan kualifikasi tingkat pendidikan serta keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja. Jumlah lowongan kerja adalah lowongan yang

diadakan oleh pemberi kerja (perusahaan) untuk diisi oleh pencari kerja yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja.

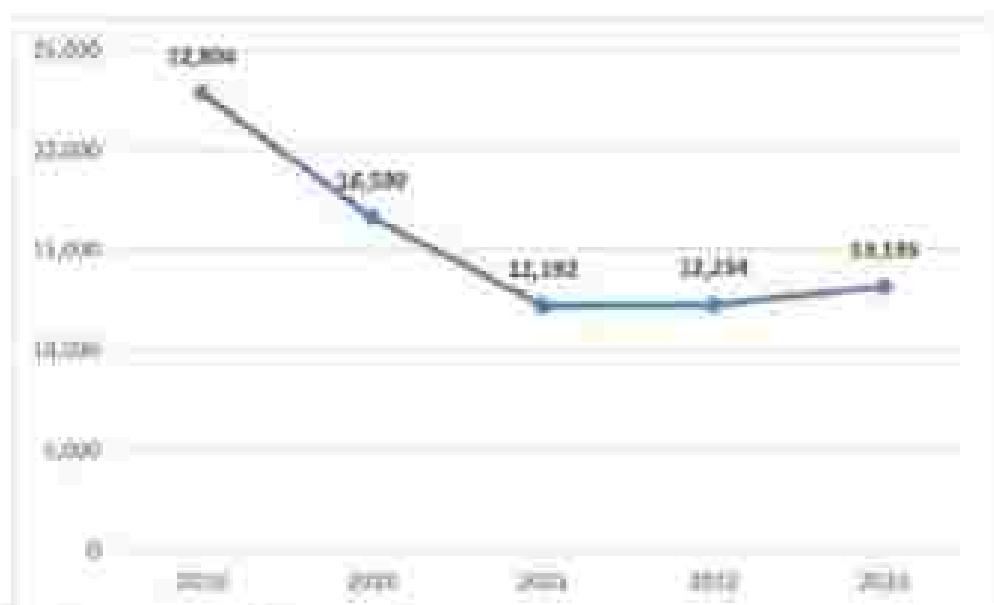
Kesempatan kerja tercipta, jika lowongan kerja yang tersedia dapat diisi oleh pencari kerja.

3.2.1. Uraian Pencapaian Kinerja Sasaran (Jumlah Lowongan Kerja)

a. Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.11, pada tahun 2023 terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya, yaitu untuk indikator Jumlah Lowongan Kerja mengalami kenaikan dari 22.737 lowongan kerja menjadi 28.137 lowongan kerja (naik sebanyak 5.414) lowongan kerja atau kenaikan sebesar 19,24 persen. Pencapaian tersebut diatas merupakan hasil dari banyaknya kegiatan Job Fair yang dilaksanakan secara *on-line* (*virtual*) yang direspon sangat baik oleh perusahaan dan pencari kerja.

b. Analisis perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya (2019 s/d 2023)



Sumber: Data Kementerian Ketenagakerjaan RI/Tahun 2023

Gambar 3.2
Grafik Jumlah Lowongan Kerja Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik di atas, Jumlah Lowongan Kerja terus mengalami kenaikan dari 22.737 pada tahun 2022 menjadi 26.616 lowongan kerja pada tahun 2023, atau kenaikan sebanyak 4.132 lowongan kerja. Hal ini diharapkan menjadi indikator yang baik dalam rangka menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

c. Analisis Pencapaian Target Akhir 2023 terhadap target akhir Renstra OPD

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja (1) Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Sumber	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target 2023	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra
			2019	2020	2021	2022			
Meningkatkan Pencapaian Perluasan Kelempitan Kerja Dan Penempatan Kerja	Jumlah Lowongan Kerja	Orang	17.658	18.187	22.628	22.737	18.000	26.864	18.000

Sumber: Data Administrasi dan Kerja Temporer 2023

Berdasarkan Tabel 3.12, Jumlah Lowongan Kerja terus mengalami kenaikan. Rata-rata capaian kinerja pada indikator Jumlah Lowongan Kerja selama 5 (lima) tahun yaitu 21.616 lowongan kerja. Sedangkan target akhir Renstra Disnaker pada indikator Jumlah Lowongan Kerja yaitu sebanyak 18.000 lowongan Kerja. Dengan realisasi sebesar 26.896 lowongan kerja dari target akhir renstra sebesar 18.000 lowongan kerja, maka kinerja tercapai dengan baik.

3.2.2. Upaya Yang Telah Dilakukan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang capaian indikator Jumlah Lowongan Kerja melalui Program Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp 1.702.858.700,00.

Tabel 3.15
Program dan Anggaran Yang Menunjang Indikator Jumlah Lowongan Kerja Tahun 2023

Indikator	Program	Anggaran
Jumlah Lowongan Kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Rp 1.702.858.700,00.

Sumber: Data Administrasi dan Kerja Temporer 2023

Adapun kegiatan Job Fair yang telah dilaksanakan sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Data Jumlah Kegiatan Virtual Job Fair
Tahun 2023

No	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Lowongan	Jumlah Peserta Jalanan	Pelamar Didalam Kota		Jumlah Yang Diterima		
					Dalam Kota	Luar Kota	Dalam Kota	Luar Kota	
1	Januari	17	1.776	89	764	0	40	0	
2	Februari	46	9.484	265	2.149	0	998	162	
3	Maret	11	838	23	0	0	1.286	0	
4	April	Tidak dilaksanakan Job Fair karena bulan ramadhan							
5	Mai	18	2.013	74	2.129	0	194	0	
6	Juni	14	1.117	89	2.666	0	453	0	
7	Juli	21	1.538	77	0	0	329	0	
8	Agustus	28	2.081	128	282	0	253	0	
9	September	32	3.070	139	3.006	0	319	0	
10	Oktober	10	2.598	51	2.045	0	206	0	
11	November	31	3.748	181	321	98	45	0	
12	Desember	28	2.297	98	13	0	100	0	
	Jumlah	244	29.140	1.130	15.008	98	4.768	162	

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2023

Sebelum dan selama masa pandemi covid-19, Dinas Ketenagakerjaan telah melakukan upaya-upaya dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Selama pandemi Covid-19, upaya pencarian lowongan kerja melalui Bursa Kerja (*Job Fair*) dilakukan secara virtual (*on-line*) sebanyak 11 (sebelas) kegiatan. Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan Job Fair secara langsung pada setiap kegiatan (*event*) tingkat Kota Tangerang.
2. Pembuatan/pengembangan aplikasi Cakap Kerja. Aplikasi ini berbasis android yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi ketenagakerjaan, pembuatan kartu pencari kerja (AK1), pendaftaran pelatihan baik berbasis kompetensi maupun kewirausahaan.
3. Pengembangan aplikasi Tas Lohar yang menyediakan informasi lowongan kerja. Aplikasi ini terdapat didalam aplikasi Tangerang LIVE yang dapat diakses oleh seluruh warga Kota Tangerang.

Tabel 3.17
Data Jumlah Lowongan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	Lowongan Kerja		Jumlah
	L	P	
TDK TAMAT SD	0	0	0
SD	95	68	163
SLTP	576	502	1078
SMK/SMK	11.135	11.756	22.891
DIPLOMA	789	493	1.284
SI	1.247	1.334	2.581
S2	71	79	150
TOTAL	13.903	14.234	28.137

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2024

3.2.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah lowongan kerja dari perusahaan, sebagai berikut :

- Tidak semua perusahaan (pemberi kerja) melaporkan lowongan kerja ke Dinas Ketenagakerjaan;
- Informasi ketersediaan lowongan kerja dari pemberi kerja terkadang dipublikasikan hanya untuk orang-orang tertentu saja.

3.2.4. Solusi Terhadap Permasalahan

Terhadap beberapa permasalahan di atas, berikut solusi pemecahan permasalahannya :

- Mendatangi perusahaan terkait pelaporan lowongan kerja yang ada di perusahaan;
- Melakukan komunikasi aktif kepada perusahaan yang telah membuka lowongan kerja melalui aplikasi untuk tindak lanjut perekrutan tenaga kerja;
- Mengoptimalkan Petugas Antar Kerja untuk pelaksanaan *job-carving* (pencarian lowongan kerja) ke perusahaan / pemberi kerja;
- Informasi lowongan kerja melalui media cetak dan media elektronik.

2. Uraian Pencapaian Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan

Tabel 3.10
Data Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan
Tahun 2023

No	Jenis Pendidikan	Pencari Kerja			Pencari Kerja Yang Ditempatkan		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tanpa Tamat SD	0	0	0	0	0	0
2	SD	71	62	133	73	62	135
3	SLTP	568	578	1.146	568	578	1.146
4	SLTA & SMA	3.766	3.231	10.997	3.766	3.231	10.997
5	Diploma/Kampus Muda	173	108	281	173	108	281
7	Sarjana	462	392	854	462	392	854
8	Pasca Sarjana (S2)	58	62	120	58	62	120
Tahun 2023		6.621	6.513	13.135	6.621	6.513	13.135

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2023

Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah presentase jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada Dinas Ketenagakerjaan. Berdasarkan Tabel 3.16, pada tahun 2023 jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebanyak 13.135 orang. Sedangkan jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 13.135 orang.

3.2.5. Uraian Pencapaian Kinerja Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan

a. Pengukuran Target & Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian kinerja indicator Presentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan sebesar 100% dari target kinerja sebesar 81,88% (capaian sebesar 122,13%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja (Z) Sampai Dengan
Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Kecamatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Target	2023 Realisasi	%
			2019	2020	2021	2022	2023			
Memangkuhan Pencapaian Persentase Perusahaan Sempatan	Pencari Kerja Terdaftar Yang	%	78,13	79,06	80,00	80,94	81,88	81,88	100	122,13

Tahun	Indikator Kinerja	Kategori	Target					2023		
			2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%
Kerja Dan Penempatan Kota	Kepercayaan									

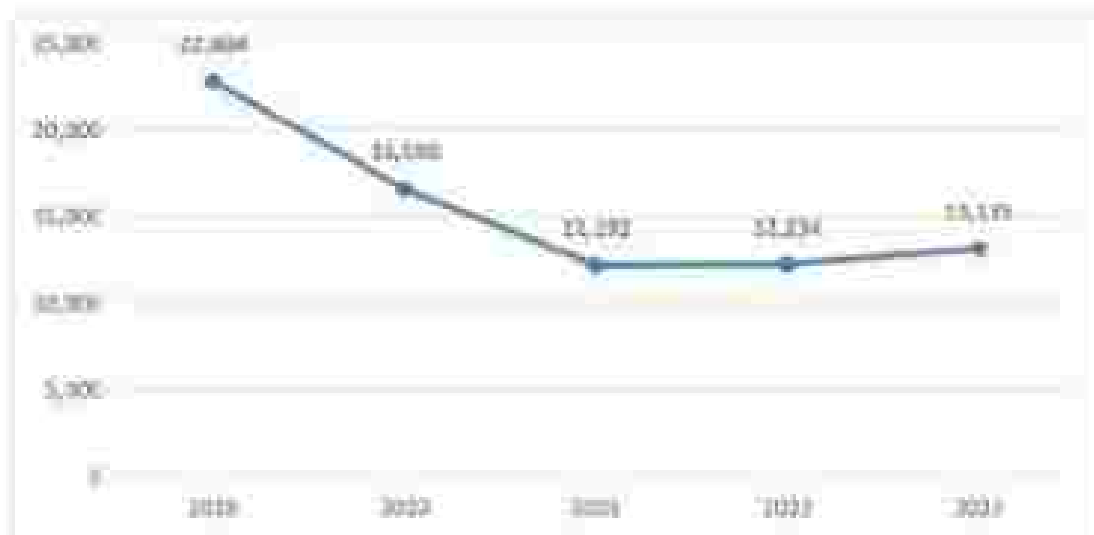
b. Analisis perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-tahun sebelumnya (2019 s/d 2023)

Tabel 3.20
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar			Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan			Pencapaian
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	2019	7.567	7.420	14.987	6.016	6.860	12.876	85,60%
2	2020	8.322	7.170	15.492	6.415	5.970	12.385	80,00%
3	2021	7.316	6.847	14.163	6.257	5.935	12.192	85,92%
4	2022	6.487	6.411	12.898	6.118	6.896	12.014	91,85%
5	2023	6.622	6.513	13.135	6.622	6.513	13.135	100%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2023

Berdasarkan Tabel 3.20, angka capaian didapat dengan membandingkan target jumlah pencari kerja yang tercatat sebanyak 13.135 orang dengan jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebanyak 13.135 dilalui dengan seratus persen, sehingga didapat capaian sebesar 100%.



Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2023

Gambar 3.3
 Grafik Jumlah Pencari Kerja Tahun 2019-2023

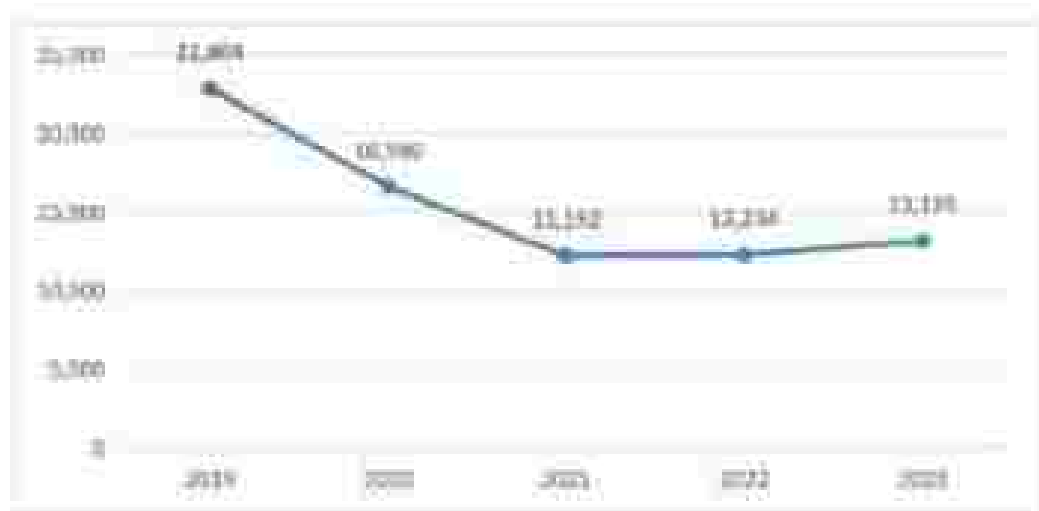
Berdasarkan Grafik di atas, jumlah Pencari Kerja lulusan wata 2019-2023 mengalami penurunan dan kenaikan yaitu pada tahun 2019 sebanyak 22.804 orang, tahun 2020 sebanyak 16.590 orang, tahun 2021 sebanyak 12.192 orang, tahun 2022 sebanyak 12.234 dan tahun 2023 sebanyak 13.135 orang.

Tabel 3.21
Jumlah Pencari Kerja dan Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan
(Menurut Tingkat Pendidikan) di Kota Tangerang
Tahun 2019 - 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Pencari Kerja			Pencari Kerja Yang Ditempatkan		
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Laki-laki	Persentase	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	0	0	0	0	0	0
2	SD	71	62	133	73	62	135
3	SLTP	568	578	1.146	568	578	1.146
4	SLTA & SMK	1266	1231	10.497	1266	1231	10.497
5	Diploma/Sarjana Muda	175	188	363	175	188	363
7	Sarjana	402	392	874	402	392	874
8	Pasca Sarjana (S2)	38	62	126	59	62	126
Tahun 2023		4.622	4.513	13.135	4.622	4.513	13.135
Tahun 2022		4.407	4.411	12.890	4.138	4.096	12.234
Tahun 2021		2.358	1.890	14.190	4.210	3.862	12.192
Tahun 2020		8.522	7.179	15.492	8.961	7.389	16.590
Tahun 2019		7.562	7.430	14.982	11.869	10.915	22.804

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2023

Dari tabel 3.21 di atas adalah bahwa berdasarkan jenis kelamin, pencari kerja pada tahun 2023 didominasi oleh tamatan SLTA & SMK sebanyak 10.497 orang.



Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2023

Gambar 3.4

Grafik Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan Tahun 2019-2023

Pencari kerja berjenis kelamin laki-laki dan lowongan kerja laki-laki masih lebih banyak dibanding pencari kerja berjenis kelamin perempuan dan lowongan kerja perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di Kota Tangerang yang mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan masih didominasi oleh laki-laki. Fenomena ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam kegiatan ekonomi belum maksimal di Kota Tangerang. Implikasinya banyak perempuan yang masih menjadi kelompok bukan angkatan kerja. Mengurus rumah tangga, adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan perempuan. Diduga pula, pergeseran nilai-nilai budaya terutama dalam hal bekerja secara ekonomis, yang terjadi di Kota Tangerang belum bergerak cepat. Istilah bahwa yang mencari pekerjaan (mencari nafkah) adalah kewajiban laki-laki masih cukup kuat berakar dalam budaya kita.

c. Analisis pencapaian target akhir 2023 terhadap target akhir Renstra OPD

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan
Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Tahun	Pencari Kerja			Pencari Kerja Yang Ditempatkan		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
2019	7.562	7.428	14.992	11.049	10.935	22.084
2020	8.322	7.178	15.492	8.981	7.609	16.590
2021	7.358	6.948	14.306	6.238	5.962	12.192
2022	6.487	6.411	12.898	6.158	6.096	12.254
2023	6.422	6.913	13.335	6.422	6.913	13.335
Rata-rata	7.281	6.971	14.252	7.900	7.421	15.321

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2023

Berdasarkan tabel di atas adalah bahwa rata-rata jumlah pencari kerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebanyak 14.252 orang, sedangkan rata-rata jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebanyak 15.321, atau rata-rata prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebesar 108,85%.

Jumlah pencari kerja yang direncanakan pada tahun 2023 sebanyak 13.335 orang dengan jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebanyak 13.335 orang (100%). Adapun target kinerja prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada akhir periode Renstra Dinas Ketenagakerjaan sebesar 81,88%.

3.2.6. Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian kinerja

a. Penjabaran Program/Kegiatan Tahun 2023 untuk mendukung capaian IKU

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.23
Capaian Indikator Utama Dinas Ketrokoagakerjaan
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Program Kegiatan	Realisasi Keuangan	Capaian
1	Meningkatkan partisipasi penuh dan keterampilan kerja dan kompetensi kerja dan penguasaan kerja	Jumlah peserta kerja	Orang	12.000	25.000	149,27	Program Penguasaan Kerja	1.888.427,30	10% peserta kerja yang dipromosikan
							Pelatihan Arah Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.081.700,00	1.000 orang peserta pelatihan kewirausahaan, penyuluhan simulasikan jabatan kerja dengan kerja sebanyak 45 kegiatan
							Pengembangan Industri/ Pabrik Kerja	43.300,00	12 kegiatan Job Fair 004 penguasaan 20-140 kelompok kerja, 13.125 Peserta Kerja Terampil yang dipromosikan
							Pelindungan Pahlawan (Pahlawan Purna Perjuangan) di Daerah Kabupaten/Kota	95.275,100	180 orang CPNS yang terdapat yang bekerja di luar negeri
	Peningkatan Pencapaian Kerja dan keterampilan yang diharapkan	%	%	81,00	100	122,13	Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas	2.945.233,40	Promosi Tenaga Kerja Terampil yang Bersertifikat Kompetensi (20.700)
							Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.200.001,40	200 orang pencari kerja yang diarah
							Pelaksanaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100.000,000	12 kegiatan Promosi LPK
							Pengawasan Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	150.000,100	400 tenaga kerja yang bersertifikat
							Program Hilirangan Industrial	070.228,000	Promosi perusahaan hilirangan industrial yang dipromosikan (70.270)

No	Kategori Strategis	Subkate- gori	Batas r-	Target 1	Realisasi 1	%	Program Kegiatan	Realisasi Pencapaian	Output
							Perencanaan Pencapaian Pencapaian dan Pencapaian Pencapaian Kerja Bersama Untuk Pencapaian yang Tidak Bersama dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota Pencapaian	110.527.000	277 Perusahaan yang sudah membuka Pencapaian Pencapaian 075 dan 30 Pencapaian yang membuka Pencapaian Kota Daerah (PKD)
							Perencanaan dan Pencapaian Pencapaian Kubung Kubung Kubung Kubung Kerja dan Pencapaian Pencapaian di Daerah Kabupaten Kota	814.712.500	135 Laporan Kasus PHN, 30 Kasus yang Bersama dengan Asupan 25 Kasus Pencapaian Daerah, 19 Kasus diarah, 14 Kasus dalam Kasus dan 12 Kasus di sub, Kasus yang Kasus dengan sebanyak 48 Kasus - 0 kali Pencapaian Pencapaian Kasus Target dan Kasus Pencapaian Kota (PKD)
							Program Pencapaian Tetap Kerja	25.818.000	
							Pencapaian Kasus Tetap Kerja Kasus	22.019.000	Tetapannya Kasus RTK Kasus dan Pencapaian Kasus Tetap Kota Daerah (RTK)

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2023

Dalam tahun anggaran 2023, Dinas Ketenagakerjaan telah menetapkan 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatkan penciptaan peluang kesempatan kerja dan penempatan kerja dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang akan dicapai dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu 1) Jumlah Lowongan Kerja dan 2) Prosentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik.

Target angka Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,54% terealisasi sebesar 6,76%. Pada indikator Jumlah Lowongan Kerja, target sebanyak 18.000 orang, terealisasi sebanyak 26.869 orang atau sebesar 149,27%. Sedangkan pada indikator

Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan target sebesar 81,88% dapat terealisasi 100% (capaian 122,13%).

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama, dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penempatan Kerja realisasi anggaran sebesar Rp 1.585.427.300,00 dengan capaian program yaitu sebanyak 100% pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dari target sebesar 81,88%.

Pada Program Penempatan Kerja dilaksanakan kegiatan :

- 1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota realisasi anggaran sebesar Rp 1.051.759.800 dengan capaian kegiatan yaitu sebanyak 1.053 pencari kerja yang mengikuti pelatihan kewirausahaan melalui sub-kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja. Serta pelaksanaan sub-kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja sebanyak 45 kegiatan.
- 2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja realisasi anggaran sebesar Rp 437.392.400 dengan capaian sebanyak 12 kegiatan Job Fair (264 perusahaan, 29.146 lowongan kerja, dan sebanyak 13.135 pencari kerja yang ditempatkan).
- 3) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota realisasi anggaran sebesar Rp 96.275.100 dengan capaian sebanyak 185 orang CPMI yang terdaftar dan bekerja di luar negeri.

b. Program Pelatihan Kerja Dan Peningkatan Produktivitas realisasi anggaran sebesar Rp 2.545.270.450 dengan capaian program yaitu Persentase Tenaga Kerja Terlatih Yang Bersertifikat Kompetensi (51,85%).

Pada Pelatihan Kerja Dan Peningkatan Produktivitas dilaksanakan kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, sub-kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, realisasi anggaran sebesar Rp 2.226.081.450 dengan capaian kegiatan yaitu sebanyak 336 pencari kerja yang dilatih di Balai Pelatihan Kerja (BLK).
- 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, realisasi anggaran sebesar Rp 163.133.900 dengan kegiatan pembinaan LRP sebanyak 60 LPK.

3) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub-kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan realisasi anggaran sebesar Rp 156.015.100, dengan capaian kegiatan sebanyak 4 dokumen dan sub-kegiatan Penyelenggaraan Uji Kompetensi target 190 orang, capaian sebanyak 466 orang bersertifikat kompetensi terdiri dari 267 orang melalui BLK, dan 199 orang melalui kerjasama dengan Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia.

c. **Program Hubungan Industrial** realisasi anggaran sebesar Rp 978.225.900 dengan capaian program yaitu Prosentase Penyelesaian Hubungan Industrial Yang D diselesaikan 70,37% dari target sebesar 65,35%.

Pada Program Hubungan Industrial dilaksanakan kegiatan :

1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi anggaran sebesar Rp 163.522.000 dengan capaian kegiatan yaitu sebanyak 273 Perusahaan yang sudah memiliki PP (Peraturan Perusahaan), dan 33 perusahaan PKB (Perjanjian Kerja Bersama), dan jumlah Bimbingan Teknis Penyusunan PP/PKB sebanyak 2 kegiatan.

2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial . Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota realisasi anggaran sebesar Rp 814.703.900 dengan capaian kegiatan 135 Laporan kasus Perselisihan Hubungan Industri, 59 kasus yang diselesaikan dengan Anjuran, 25 kasus dengan Perundingan Bersama, 19 kasus dengan Bipartit, 14 kasus dalam proses, dan 18 kasus dicabut. Sub-kegiatan Mekanisme Teknik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 2 kegiatan, dan Pelaksanaan May-Day sebanyak 1 kegiatan, Sub-kegiatan Pelaksanaan Operasionalisasi LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota (Depeko) sebanyak 12 kegiatan dan jumlah LKS Tripartit yang Dibina sebanyak 1 lembaga.

d. **Program Perencanaan Tenaga Kerja** realisasi anggaran sebesar Rp 79.619.000 dengan capaian program yaitu Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja 100%.

Pada Program Perencanaan Tenaga Kerja dilaksanakan kegiatan :

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro, terdiri dari jumlah Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro sebanyak 20 perusahaan dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro sebanyak 1 dokumen.

3.2.7. Permasalahan Yang Dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja pencari kerja terdaftar yang ditempatkan, sebagai berikut :

1. Tidak semua pencari kerja terdaftar menginformasikan /melaporkan keberadaan mereka setelah mendapatkan pekerjaan atau menjadi wirausaha baru;
2. Perusahaan pemberi kerja sebagai peserta Bursa Kerja (*Job Fair*) tidak seluruhnya melaporkan hasil penempatan tenaga kerja;
3. Pencari kerja terdaftar / lulusan SMK dan sarjana masih banyak yang memilih (*gilih-pilih*) dalam mencari pekerjaan;
4. Belum semua SMK membentuk/memiliki BKK;
5. Lowongan kerja yang tersedia, ada yang tidak sesuai dengan kompetensi/skill calon pekerja;

3.2.8. Solusi terhadap permasalahan

Terhadap beberapa permasalahan di atas, berikut solusi pemecahan permasalahan :

1. Mendatangi perusahaan terkait pelaporan lowongan kerja yang ada di perusahaan;
2. Melakukan komunikasi aktif kepada perusahaan yang telah membuka lowongan kerja di aplikasi siap kerja untuk tindak lanjut perekrutan tenaga kerja;
3. Melakukan pendataan kepada masyarakat untuk mendapatkan data real penduduk yang belum bekerja di setiap kecamatan;
4. Memberikan lebih banyak akses peningkatan kesempatan kerja melalui pameran kesempatan kerja (*Job Fair*) dan mendirikan Bursa Kerja Khusus (BKK);
5. Mempermudah sistem pelaporan pencari kerja untuk melaporkan sudah bekerja atau belum secara online.

6. Mendorong agar program *link and match* di SMK dapat berjalan dengan baik.
7. Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan perusahaan dalam rangka menyerap lulusan pelatihan di BLK.
8. Melaksanakan pelatihan perluasan kesempatan kerja untuk mendorong kemandirian dalam bekerja (wirausaha) dengan memberikan pendampingan dan modal usaha.
9. Melakukan re-inventarisasi sarana dan prasarana kebutuhan pelatihan di BLK yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja.
10. Mengintensifkan pembinaan terhadap Bursa Kerja Khusus (BKK) yang sudah ada, serta melakukan pembentakan BKK di setiap SMK di Kota Tangerang. Dengan dibentuknya BKK, informasi kesempatan kerja langsung dapat diterima oleh siswa SMK atau calon lulusan SMK untuk mempersiapkan memasuki dunia kerja/dunia usaha.
11. Melaksanakan *Job Fair* secara virtual.
12. Pelatihan kerja di BLK milik pemerintah.
13. Pelatihan perluasan kesempatan kerja (kewirausahaan).
14. Penugangan.
15. Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Tabel 3.24
SMK Dan BKK di Kota Tangerang Tahun 2023

Tahun	Jumlah SMK	Jumlah BKK	%
2020	126	65	51,58
2021	130	69	53,08
2022	121	119	98,34
2023	121	121	100

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2023

Bursa Kerja Khusus (BKK) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksanaan pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja yang merupakan mitra Dinas Ketenagakerjaan. Pembinaan yang dilakukan secara intensif ke SMK berhasil meningkatkan jumlah BKK di Kota Tangerang menjadi sebanyak 121 BKK dari sebelumnya sebanyak 119 BKK.

Pada tahun 2023, kegiatan pemagangan yang dilaksanakan di perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Jumlah Kegiatan Pemagangan
Tahun 2023

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH PESERTA MAGANG (orang)
1	PT. Bright Mobile Telecommunications (OPPO)	200
2	PT. Bank BCA KCP Kres Giduh	1
3	PT. Bank BSI KC Tangerang Merdeka	14
4	PT. Bank Persewa KC Daan Mogot	2
5	PT. Bank BSI KC Budara Soekarno Hatta	2
6	PT. Pcia Paperindo	(3)
7	PT. Yasmil Abadi Utama Plastik	96
8	PT. Adiperkasa Amgreh Prima	24
TOTAL		402

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2023

Kegiatan pemagangan diselenggarakan bagi mereka yang berusia minimal 18 tahun, untuk mempelajari pengendalian sikap kerja, pengetahuan dan ketrampilan berdasarkan pengalaman pelaksanaan tugas sesuai dengan program pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran kerja, kemampuan dan produktifitas. Pada tahun 2023 penyerapan tenaga kerja melalui pemagangan sebanyak 402 orang yang tersebar di 8 (delapan) perusahaan. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan kerjasama dengan organisasi profesi untuk menajagi potensi pemagangan bagi lulusan pelatihan kerja.

Pada tahun 2023, kegiatan penempatan tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilaksanakan di perusahaan sebanyak 4.900 orang pada 175 perusahaan di Kota Tangerang.

3.2.9. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.26
Rekapitulasi Output Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan

Dalam Rangka Menurunkan Angka TPT
Tahun 2023

No	Nama Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	4. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja Perluasan Kesempuluan Kerja	45 kegiatan, 1.053 orang peserta pelatihan kewirausahaan
		5. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/ Bursa Kerja	12 kegiatan Job Fair (264 perusahaan, 29.146 lowongan kerja, 15.406 pelamar, 13.125 Pencari Kerja Teredaftar yang ditandingkan, 2.401 siswa bekerja melalui Bursa Kerja Khusus
		6. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	185 orang PMI yang terdata
2	Program Pelatihan Kerja Dan Peningkatan Produktivitas	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	336 orang pencari kerja yang dilatih di dalam Lapangan Kerja 199 orang pencari kerja yang dilatih di melalui program kerjasama dengan Yayasan Baitan Kemampuan: Indonesia 40 orang pencari kerja yang dilatih di melalui program kerjasama dengan Yayasan Pita Internasional Indonesia
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80 LPK yang dilina

No	Nama Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output
		Penguatan Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	267 tenaga kerja bernertifikasi BNSP melalui BKK
				198 tenaga kerja bernertifikasi BNSP melalui Yayasan Habitat Kemasyarakatan Indonesia
			Pemunggaran	402 orang mengikuti penempatan kerja di 9 perusahaan
3	Program Pelayanan Industrial	Pengsisihan Peraturan Perencanaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hampir beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	1.784 orang mengikuti program PKWT

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2023

Dari tabel 3.26 terlihat bahwa upaya untuk menurunkan angka TPT melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan:

Pada tahun 2023, kondisi pandemi covid-19 sudah mulai menurun. Hal ini berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Tangerang. Program Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan masih perlu ditingkatkan, khususnya pembinaan terhadap Bursa Kerja Khusus (BKK). Kegiatan monitoring dan pembinaan menjadi sarana penyampaian informasi pelaporan penerimaan karyawan, termasuk pembinaan yang dilakukan terhadap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan BKK. Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan berbasis kewirausahaan mendapat respon yang baik oleh masyarakat masih memerlukan tindak lanjut seperti pendampingan dan pemberian akses bantuan permodalan sehingga diharapkan peserta bisa menjadi wirausaha baru. Hal ini tentu berdampak pada penurunan angka pengangguran di Kota Tangerang. Penyelenggaraan Job Fair secara *on-line* yang dimulai pada saat pandemi, ternyata cukup efektif sehingga, sehingga informasi lowongan kerja dapat disampaikan

kepada masyarakat. Peluang bekerja diluar negeri dapat difasilitasi melalui Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, masih dapat dioptimalkan mengingat banyaknya peluang lowongan kerja di luar negeri.

Program Pelatihan Kerja Dan Peningkatan Produktivitas yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) belum optimal dalam penyerapan lulusan pelatihan. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum adanya kesepakatan bersama antara Dinas Ketenagakerjaan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang membutuhkan lulusan BLK. Selain itu, ketepatan program vokasi yang dilaksanakan harus didukung sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan industri. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta juga masih memerlukan pembinaan dan kolaborasi pelatihan vokasi yang menjadi kebutuhan industri dan yang membuka peluang berwirausaha. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/kota juga belum optimal dilaksanakan. Pengukuran produktivitas perusahaan dalam menunjang perusahaan yang sehat dan karyawan yang memiliki kompetensi belum optimal. Begitu pula dengan Pemagangan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) perlu mendapat perhatian dalam rangka perluasan kesempatan kerja serta untuk mengurangi angka penangguhan pada tahun-tahun yang akan datang.

Jumlah mediator perselisihan hubungan industrial masih terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus perselisihan yang harus diselesaikan. Pembinaan sarana hubungan industrial yang belum optimal. Penambahan jumlah tenaga mediator perselisihan hubungan industrial diharapkan bisa menyelesaikan perselisihan lebih efektif.

Jumlah pejabat fungsional Pengantar Kerja perlu ditingkatkan jumlah dan kapasitasnya untuk dapat mendorong perusahaan menyampaikan informasi kebutuhan pekerja sesuai dengan skill yang dimiliki para pencari kerja, serta optimalisasi peran BEK dalam menyebarkan atau menempatkan luhisannya.

Optimalisasi pengembangan aplikasi Cakap Kerja yang terintegrasi dengan portal Pemerintah Kota Tangerang "LIVE" diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Tangerang dalam memperoleh informasi ketenagakerjaan secara

on-Job, seperti pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK1), informasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perluasan Kesempatan Kerja, Informasi Lowongan Kerja (Tat Loker), serta *Job Fair*.

3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.27
Analisis Efisiensi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Petyerapan Anggaran	Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	111,54%	92,75%	7,25%
2	Meningkatkan Punciptaan Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Kerja	Jumlah lowongan kerja	100,27%	91,10%	6,90%
		Pencari kerja terlayah yang ditempatkan	100%		

Sumber: Data Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2023

a. Analisis Efisiensi

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang telah memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Disnaker Tahun 2019-2023 maupun Renja Disnaker Tahun 2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan tujuan untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan

target kinerja 7,54% dan realisasi sebesar 6,76% (capaian 111,54%). Penyerapan anggaran sebesar 92,75% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 7,25%.

Lebih lanjut untuk sasaran Meningkatkan Penciptaan Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Kerja, indikator Jumlah Lowongan Kerja target kinerja sebanyak 18.000 lowongan kerja dan realisasi sebanyak 26.069 lowongan kerja (capaian 149,27%).

Kemudian melalui indikator Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan target kinerja sebesar 81,88 % dan realisasi sebesar 100% (capaian 122,13%).

Untuk indikator Jumlah Lowongan Kerja dan indikator Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan, Penyerapan anggaran sebesar 93,10% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 6,90%.

Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui beberapa poin anggaran pendukung, koordinasi antar bidang dan sekretariat untuk saling mendukung dan membantu dalam penyelesaian kegiatan, perencanaan anggaran yang lebih teliti dan terencana dengan baik serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian kinerja organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinasaker Kota Tangerang pada tahun 2023.

b. Analisis Program/Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan, sesuai ketentuan dalam pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan Dinasaker Kota Tangerang.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan hasil review atas Rencana Dinasaker Tahun 2019-2023.

Tabel 3.28
Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinasaker Kota Tangerang
Tahun 2023

No	Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Program Penempatan Tenaga Kerja			
1	Jumlah Lowongan Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	449.144.400,00	437.392.400,00	97,38
2	Pasar Kerja Terdaftar Yang Dimanfaatkan	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	1.130.223.700,00	1.051.759.000,00	93,14
		Perwakilan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten /Kota	103.475.100,00	94.275.100,00	91,19
	Jumlah		1.700.856.700,00	1.585.427.300,00	93,18

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui program yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian kinerja organisasi yaitu Program Penempatan Tenaga Kerja serta kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yaitu Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota dan Perwakilan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten /Kota.

3.4. Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran)

Pada APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Dinasaker mendapat alokasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 13.363.285.842,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 12.309.310.191,00 atau temerap 92,11%

Adapun rincian anggaran dan realisasi yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap kinerja Renstra Dinasaker Kota Tangerang pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.29
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Disnaker Kota Tangerang
Tahun 2023

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran		%
		Alokasi	Realisasi Sampai 31 Des 2023	
I	Program Peningjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.509.204.452,00	7.119.807.541,00	94,82
1	Administrasi Umum Pemerintahan Daerah	3.107.850.000,00	2.931.496.514,00	94,34
2	Pengadaan Jasa Pengantar Urusan Pemerintah Daerah	3.632.266.114,00	3.491.939.094,00	96,16
3	Pembelian dan Penyewaan Mobil Daerah Pengantar Urusan Pemerintahan Daerah	449.879.876,00	446.371.933,00	99,39
II	Program Perencanaan Tenaga Kerja	94.809.200,00	79.619.000,00	84,93
4	Pengembangan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	94.809.200,00	79.619.000,00	84,93
III	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.456.194.390,00	2.345.230.450,00	95,48
5	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	2.300.154.300,00	2.226.001.450,00	96,77
6	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	167.276.700,00	163.133.900,00	97,52
7	Pengembangan Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.763.390,00	156.015.100,00	103,47
III	Program Penempatan Kerja	3.702.808.700,00	3.500.423.300,00	94,54
8	Pelayanan Antarjawa di Daerah Kabupaten / Kota	1.721.493.750,00	1.611.942.250,00	93,62
9	Pengelolaan Industri Pagar Kerja	449.146.400,00	433.742.400,00	96,58
10	Perlindungan PMI (Pra dan Pasca Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	1.001.475.100,00	96.275.100,00	9,61
IV	Program Hubungan Industrial	1.800.078.900,00	970.125.000,00	54,45
11	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	179.920.000,00	163.572.000,00	91,41
12	Pencegahan dan Penyelesaian Peralihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Pinstapan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota	620.158.900,00	804.701.000,00	129,76

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2023

Tabel 3.30
Realisasi Anggaran per Triwulan
Tahun Anggaran 2023

--

Realisasi Anggaran			
Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4
4.384.246.986,00	6.906.565.420,00	5.439.500.929,00	6.795.291.084,00

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2023



Gambar 3.5
Grafik Penyerapan Anggaran per Triwulan
Tahun 2023

Efisiensi Anggaran Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan memiliki total anggaran sebesar Rp 25.363.718.902,00, terbagi atas Belanja Gaji Pegawai sebesar Rp 12.000.433.060,00 dan Belanja Barang dan jasa sebesar Rp 13.363.285.842,00.

Dinas Ketenagakerjaan memiliki 5 (lima) program yaitu :

- 2) Program Pemanjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, anggaran sebesar Rp 16.507.813.920 terdiri dari :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran sebesar Rp 19.909.717.712,00
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp 3.307.038.488,00
 - c. Penyediaan Jasa Pemanjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp 3.652.266.314,00
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemanjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp 949.979.850,00
- 3) Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp 94.864.200,00 terdiri dari :

- a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) anggaran sebesar Rp 94.869.200,00
- 4) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 2.656.194.390,00, terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi anggaran sebesar Rp 2.330.154.390,00
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta anggaran sebesar Rp 167.276.900,00
 - c. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp 158.763.100,00
- 5) Program Penempatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp 1.702.858.700,00, terdiri dari :
 - a. Pelayaran Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota anggaran sebesar Rp 1.150.237.200,00
 - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja anggaran sebesar Rp 449.146.400,00
 - c. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp 103.475.100,00
- 6) Program Hubungan Industrial dengan anggaran sebesar Rp 1.000.078.900,00, terdiri dari :
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 173.920.000,00
 - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Pemutusan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota Rp 826.158.900,00

Pada Tahun 2023 telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 1.838.114.483,00. Adapun rincian efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan terdapat pada tabel dibawah.

Tabel 23
 Struktur Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023
 dari Revisi Anggaran

No	Program/Kelembagaan/Program Kegiatan	Target dan Realisasi (Rencana) 2022			Target Realisasi 2023 (Revisi)			Volume Program		Keterangan
		Target	Realisasi	Realisasi (%)	Target (Rp)	Revisi (Rp)	Revisi (%)	Revisi (Rp)	Revisi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Program/Kelembagaan/Program Kegiatan									
1	Administrasi, Manajemen Keuangan dan Umum Pemerintahan (Monev dan Organisasi)				12.903.000,00	12.903.000,00	100%	169.000,00	430	Subsidi dari RKA 2022/2023
2	Administrasi Umum Pemerintahan				1.000.000,00	1.000.000,00	100%	275.000,00	630	Subsidi dari RKA 2022/2023
	Kegiatan Lain-lain	100%	100%	100%						
	Kegiatan Lain-lain	100%	100%	100%						
	Kegiatan Lain-lain	100%	100%	100%						
	Kegiatan Lain-lain	100%	100%	100%						
	Kegiatan Lain-lain	100%	100%	100%						
	Kegiatan Lain-lain	100%	100%	100%						
	Kegiatan Lain-lain	100%	100%	100%						
	Kegiatan Lain-lain	100%	100%	100%						
	Kegiatan Lain-lain	100%	100%	100%						
	Kegiatan Lain-lain	100%	100%	100%						
	Kegiatan Lain-lain	100%	100%	100%						

No	Activity/Project/Initiative/Programme/Policy	Target 2022 (Planned/Actual/Current)			Target 2023 (Planned/Actual/Current)			Planned/Actual Target/Current		Remarks
		Target (%)	Actual (%)	Current (%)	Target (%)	Actual (%)	Current (%)	Target (%)	Current (%)	
1	Strengthened Governance/Management/Performance/Programme/Policy	75%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	On track
2	Strengthened Business Plan/Performance/Programme/Policy	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	On track
3	Strengthened Business Plan/Performance/Programme/Policy	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	On track
4	Strengthened Business Plan/Performance/Programme/Policy	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	On track
5	Strengthened Business Plan/Performance/Programme/Policy	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	On track
6	Strengthened Business Plan/Performance/Programme/Policy	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	On track
7	Strengthened Business Plan/Performance/Programme/Policy	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	On track
8	Strengthened Business Plan/Performance/Programme/Policy	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	On track
9	Strengthened Business Plan/Performance/Programme/Policy	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	On track
10	Strengthened Business Plan/Performance/Programme/Policy	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	On track

No	Program/Unit Kegiatan Kegiatan	Detail dan Jumlah (Kategori Biaya)			Detail dan Jumlah Per Kegiatan			Detail Capaian Kegiatan		Berkas
		Jumlah Item	Target %	Realisasi %	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran % (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ii	Bimbingan Teknis Desa Desa (BT2)	1000000000000000000	100%	100%	0%					
	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	1000000000000000000	100%	100%	0%	1000000000000000000	1000000000000000000	100%	1000000000000000000	100%
iii	Program pelatihan/latihan dan/atau seminar/teknis/kerja	1000000000000000000	100%	100%	0%	1000000000000000000	1000000000000000000	100%	1000000000000000000	100%
v	Penyusunan Rencana Kerja (RKD) Desa	1000000000000000000	100%	100%	0%	1000000000000000000	1000000000000000000	100%	1000000000000000000	100%
vi	Penerapan Sistem Informasi Desa	1000000000000000000	100%	100%	0%	1000000000000000000	1000000000000000000	100%	1000000000000000000	100%
vii	Penyusunan Rencana Kerja (RKD) Desa	1000000000000000000	100%	100%	0%	1000000000000000000	1000000000000000000	100%	1000000000000000000	100%
viii	Program pelatihan/latihan dan/atau seminar/teknis/kerja	1000000000000000000	100%	100%	0%	1000000000000000000	1000000000000000000	100%	1000000000000000000	100%
ix	Penyusunan Rencana Kerja (RKD) Desa	1000000000000000000	100%	100%	0%	1000000000000000000	1000000000000000000	100%	1000000000000000000	100%
x	Program pelatihan/latihan dan/atau seminar/teknis/kerja	1000000000000000000	100%	100%	0%	1000000000000000000	1000000000000000000	100%	1000000000000000000	100%
xi	Program pelatihan/latihan dan/atau seminar/teknis/kerja	1000000000000000000	100%	100%	0%	1000000000000000000	1000000000000000000	100%	1000000000000000000	100%
xii	Program pelatihan/latihan dan/atau seminar/teknis/kerja	1000000000000000000	100%	100%	0%	1000000000000000000	1000000000000000000	100%	1000000000000000000	100%
xiii	Program pelatihan/latihan dan/atau seminar/teknis/kerja	1000000000000000000	100%	100%	0%	1000000000000000000	1000000000000000000	100%	1000000000000000000	100%
xiv	Program pelatihan/latihan dan/atau seminar/teknis/kerja	1000000000000000000	100%	100%	0%	1000000000000000000	1000000000000000000	100%	1000000000000000000	100%

No	Activity Details (Reference/Project/Work Order)	Direct Job Related Expenses/Other			Direct Job Related Fuel Expenses			Direct Fuel Expenses		Remarks
		Fuel Cost	Other Cost	Total Cost (₹)	Actual Fuel	Approved Fuel	Approved Fuel Cost (₹)	Actual Fuel Cost (₹)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Preparation for work for construction Work done on the school from 19/04/2022 to 24/04/2022 No additional work done for school in the 2nd week of April 2022 Preparation for work for construction	₹ 40	₹ 4	₹ 44	₹ 44	₹ 44	₹ 44	₹ 44	₹ 44	
2	Preparation for work for construction Work done on the school from 25/04/2022 to 30/04/2022 No additional work done for school in the 3rd week of April 2022 Preparation for work for construction	₹ 40	₹ 4	₹ 44	₹ 44	₹ 44	₹ 44	₹ 44	₹ 44	

3.5. Upaya Mengatasi Kendala Penyerapan

Tidak terlalu banyak kendala dalam penyerapan anggaran. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan BPKD terkait dengan pengalihan anggaran untuk kegiatan lain. Namun tidak diperkenankan karena akan berimbas pada pengalokasian anggaran tahun selanjutnya.

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan salah satu langkah dalam memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan mengenai analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Disnaker Kota Tangerang menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan serta 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) target 7,54% realisasi 6,76% (capaian sebesar 111,54%)
- Sasaran 1 Indikator ke-1 Jumlah Lowongan Kerja target 18.000 lowongan kerja, realisasi 26.869 lowongan kerja (capaian sebesar 149,27%)
- Sasaran 1 Indikator ke-2 Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan target 81,88% realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 122,13%).

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Disnaker Kota Tangerang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, Disnaker mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 25.363.718.902,00 dan telah terealisasi sebesar 23.525.604.419,00 atau terealisasi 92,75%.

Tersusunnya LKIP Disaker Kota Tangerang Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Disaker Kota Tangerang kepada pihak-pihak terkait baik bagi stakeholder atau pun pihak lain yang telah ikut ambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tangerang.

4.2. Saran

Dari uraian pencapaian target sasaran yang terdapat pada indikator 1 dan indikator 2 telah tercapai atau melampaui target. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai indikator makro pada tahun 2023 tercapai. Penetapan angka TPT dilakukan oleh BPS melalui metode survey selanjutnya agar adanya koordinasi antara BPS Kota Tangerang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

Kegiatan pelatihan harus menjadi satu kesatuan dalam rangka mengurangi atau menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tangerang. baik berbasis kompetensi maupun berbasis kewirausahaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat untuk mendorong kemandirian masyarakat, yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan atau yang dilaksanakan oleh lembaga lain.

Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang waktu pelaksanaannya cukup lama, sebaiknya mendapat perlindungan kecelakaan kerja (disertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan). Hal ini untuk mengurangi dampak/resiko sosial jika terjadi kecelakaan selama masa pelatihan.

Peserta pelatihan berbasis kewirausahaan mendapatkan bimbingan lanjutan/pendampingan dan bantuan modal usaha agar menjadi wirasaha baru yang mandiri.

Upaya yang dilakukan ke depan yaitu dengan meningkatkan sinergitas antar seluruh komponen penyelenggara vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka meningkatkan penyerapan lulusan pelatihan sehingga berdampak bagi penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tangerang